

PERCEPATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN DENGAN MODEL AGROESTATE BERBASIS KELAPA SAWIT

*Acceleration Empowerment Economics the Rural Society with
Palm Based on Agroestate Model*

Almasdi Syahza¹

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: asyahza@yahoo.co.id

website: <http://almasdi.unri.ac.id>

ABSTRAK

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani. Model yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan adalah dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa sawit (ABK). Melalui program ABK ini petani memperoleh kesempatan untuk membeli/memiliki saham di pabrik kelapa sawit (PKS) perusahaan pengembang. Dalam model ABK ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model ABK merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

Kata kunci: Agroestate, kelapa sawit

Pendahuluan

Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis dilevel makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani

¹ Prof. Dr. H. Almasdi Syahza, SE., MP: Peneliti senior Universitas Riau; Pengajar Program Studi Agribisnis Universitas Riau.

yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Ketidakterdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Basri, 2003).

Pembangunan pedesaan harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass dalam Syahza (2004) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang; *Kedua*, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*); *Ketiga*, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; *Keempat*, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; *Kelima*, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap *agropolitan district*, termasuk peningkatan hasil pertanian; *Keenam*, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara *agropolitan district* dengan kota; *Ketujuh*, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya; *Kedelapan*, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan.

Menurut Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa;

Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa. Arifin (2001) menyatakan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Hasil penelitian Syahza (2003a), faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Syahza, 2003b): 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, 2), ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah, 3) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, 5) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, dan 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri.

Dalam upaya pembangunan ekonomi di pedesaan, pemerintah Propinsi Riau mengambil satu kebijakan yaitu pembangunan sektor pertanian yang difokuskan di daerah pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi

pedesaan tersebut pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Armas, 2005).

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang salah satunya menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit dapat memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Hasil penelitian Elpawati (2000) bagi petani peserta pola PIR, petani kelapa sawit sudah berada pada kategori sejahtera. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengembangan usahatani di sekitar areal pola PIR untuk mempercepat difusi teknologi dan mencegah terjadinya kesenjangan teknologi antara petani PIR dengan petani non PIR. Untuk mendukung pengembangan usahatani tersebut, Juraemi (2003) mengungkapkan perlunya dikembangkan subsistem pengolahan dan pemasaran yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Untuk itu perlu dikembangkan industri hilir yang berbasis kelapa sawit di daerah pedesaan. Menurut Suhartiningsih (2003), untuk pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan deregulasi dalam industri kelapa sawit. Untuk berinvestasi industri kelapa sawit di Indonesia selama ini, investor harus melewati 17 lembaga di pusat dan 27 lembaga di daerah. Hal ini akan menambah biaya perizinan bagi investor. Di Malaysia investor hanya berhubungan dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB). Lebih lanjut Wiwit Suhartiningsih menganjurkan sebaiknya di Indonesia dibentuk *Indonesia Palm Oil Board* (IPOB). Dengan adanya dukungan industri pengolahan kelapa sawit di daerah yang berpotensi, maka diharapkan akan dapat menciptakan nilai tambah dan *multiplier effect* ekonomi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Zahri (2003), yaitu perlunya peningkatan pembinaan dan kinerja kelembagaan seperti koperasi dan kelompok tani. Perlu perbaikan pola kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, pengembangan kemitraan dengan manajemen koperasi, dan pemberian lahan minimal 2 ha per rumah tangga petani, agar petani dapat hidup layak. Dari sisi lain Juraemi (2003) menyarankan untuk dilakukan

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan konsep-konsep baru dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mampu memberdayakan petani di daerah pedesaan.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Untuk itu perlu dirancang model pembangunan ekonomi pedesaan berbasis pertanian (agribisnis). Rancangan ini diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan baik dari subsektor perkebunan maupun nonperkebunan. Hasil penelitian ini dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan pertanian ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerapkan metode survey. Lokasi penelitian dilakukan di tiga kabupaten (Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kampar). Di setiap kabupaten dipilih daerah potensial pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan kriteria sebagai berikut: (1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang potensial perkebunan kelapa sawit; (2) petani sampel terdiri dari petani kelapa sawit swadaya murni dan petani yang belum memiliki kebun kelapa sawit yang hidupnya tergantung pada hasil pertanian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumbernya sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, terutama terhadap data kualitatif. Dari hasil analisis kualitatif akan diperoleh bentuk model pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berbasis agribisnis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor pertanian maka dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan di daerah Riau telah berkembang dengan pesat. Perkembangan subsektor perkebunan terlihat di tiga komoditas utama yakni kelapa sawit, karet, dan kelapa (lihat Tabel 1). Kelapa lebih banyak dikembangkan oleh petani di wilayah pesisir khususnya daerah perairan propinsi Riau. Sementara daerah daratan komoditas yang berkembang adalah kelapa sawit dan karet.

Tabel 1 Luas Areal dan Produksi Komoditas Andalan Perkebunan di Daerah Riau Tahun 2001-2004

Uraian	2001	2002	2003	2004
Luas areal (ha)				
Kelapa sawit	1.119.988	1.312.661	1.340.036	1.486.989
Karet	566.130	547.123	544.735	543.783
Kelapa	622.796	633.157	639.340	550.052
Produksi (ton)				
Kelapa sawit	2.645.844	3.697.552	3.386.801	3.832.228
Karet	556.676	291.181	303.676	305.644
Kelapa	575.538	532.008	534.719	572.624

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2006

Luas perkebunan kelapa sawit yang diusahakan di daerah Riau pada tahun 2001 seluas 1.119.988 ha, berkembang menjadi 1.312.661 ha pada 2002. Luas perkebunan karet pada tahun 2001 yakni 566.130 ha dan pada tahun 2002 menurun menjadi 547.123 ha. Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004 telah mencapai 1.486.989 ha, sementara luas perkebunan karet hanya 543.783. Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membuktikan bahwa masyarakat Riau sangat antusias untuk

berusahatani kelapa sawit. Disamping itu kondisi daerah juga sangat mendukung berkembangnya usahatani kelapa sawit. Dari sisi lain terlihat penurunan luas areal perkebunan karet dan kelapa, hal ini disebabkan aktivitas petani mengganti komoditas karet dengan kelapa sawit, terutama untuk jenis tanaman karet yang sudah tua.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian Syahza (2004) menjelaskan bahwa: pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; dapat menciptakan *multiplier effect* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit dan karet. Pembangunan perkebunan ini sekarang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

Dari satu sisi tidak terjadi keseimbangan antara produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dengan daya tampung industri pengolah. Hal ini juga dialami oleh industri karet. Masyarakat telah banyak mengalihkan kebun semula karet menjadi kelapa sawit. Karena mereka melihat dan merasakan bahwa menjadi petani kelapa sawit lebih menjanjikan kesejahteraan dibandingkan dengan karet. Salah satu penyebabnya adalah produksi kelapa sawit oleh petani berupa tandan buah segar (TBS) pasarnya lebih terjamin dibandingkan dengan pasar dari karet rakyat.

Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani plasma dan swadaya. Model yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan adalah dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa sawit (ABK).

Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralkan dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Melalui program ABK ini petani memperoleh kesempatan untuk membeli/memiliki saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan

baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep kemitraan ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataniya maupun pabrik pengolahannya, dimana pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

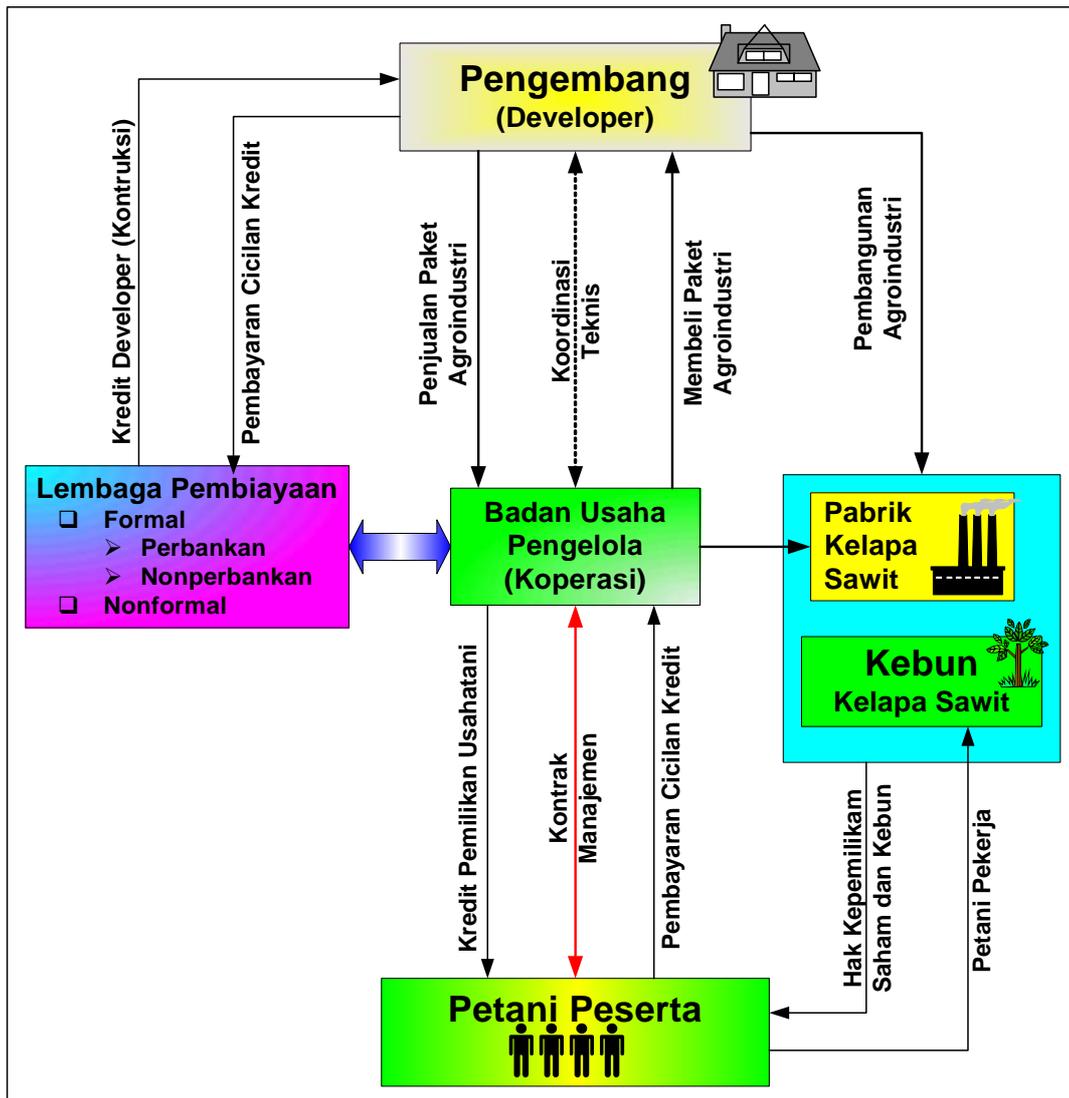
Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

Model ABK dirancang untuk pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbasis pertanian (perkebunan kelapa sawit). Model ABK ini bertujuan untuk membangun perkebunan berbasis kelapa sawit yang diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai lahan perkebunan dan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha untuk pengembangan usahataniya. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan yang layak untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga petani. Model ini merupakan pengembangan dari konsep agropolitan yang dicetuskan oleh Friedman dan Douglass (1976). Konsep agropolitan adalah salah satu strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Secara singkat konsep model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) yang akan melibatkan masyarakat pedesaan (bagi petani yang belum memiliki lahan perkebunan) disajikan pada Gambar 1. Untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

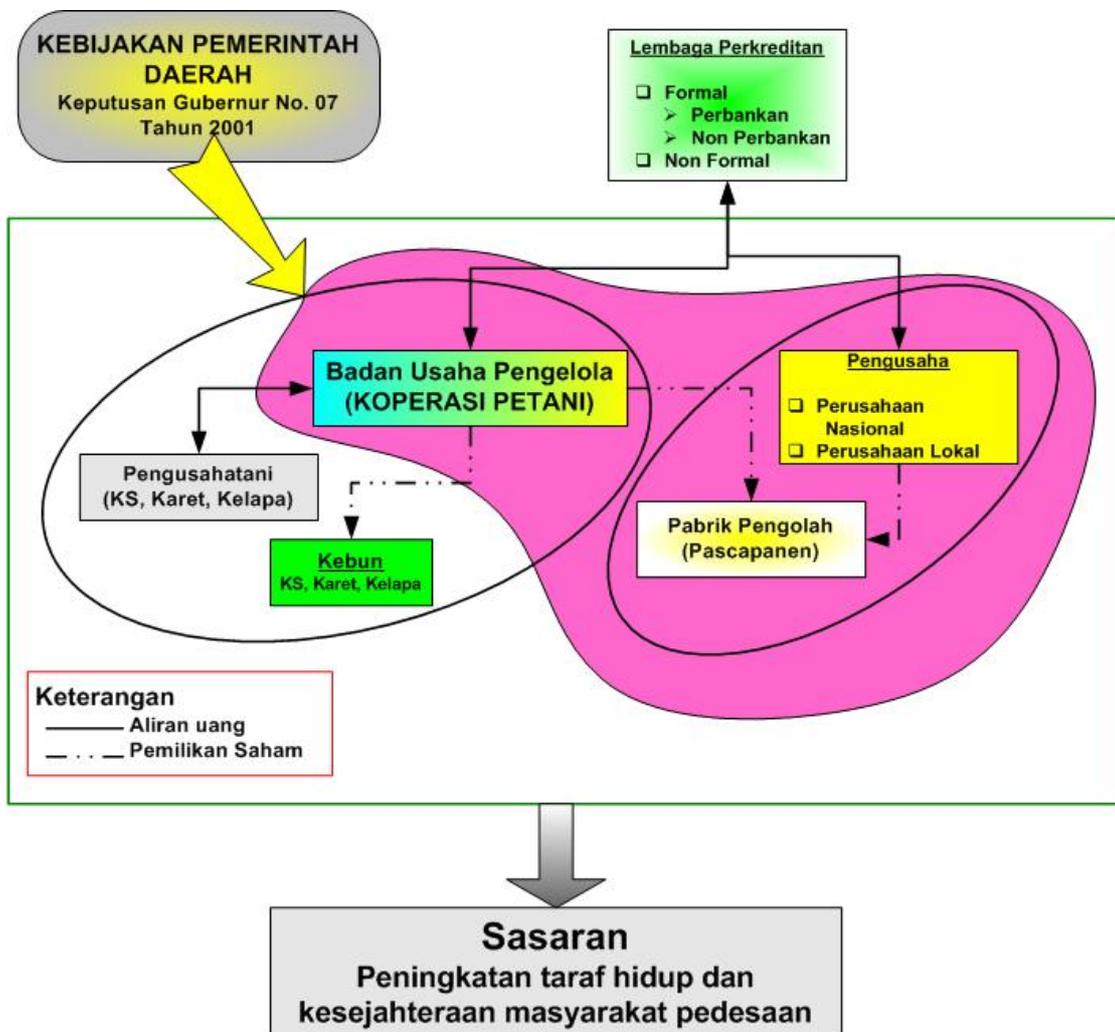
- ❑ Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.
- ❑ Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.



Gambar 1 Skema Konseptual Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan

- ❑ Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan kesepakatan. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.
- ❑ Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 2.

- ❑ Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
- ❑ Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja, dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
- ❑ Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.



Gambar 2 Rancangan Kepemilikan Modal pada Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan.

Pengembangan model ABK bagi petani di pedesaan yang telah memiliki lahan untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit, namun mereka

tidak mempunyai modal usaha yang memadai untuk pengembangan perkebunan, maka dikembangkan melalui model ABK pola kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru atau wilayah yang sudah ada dengan teknologi maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang layak. Juga mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang bersifat agribisnis dengan memasukkan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil secara terpadu.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan model ABK pola kemitraan dilakukan oleh perusahaan di bidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti (mitra) dengan pembinaan dan dukungan instansi-instansi pemerintah daerah yang fungsinya terkait dengan pengembangan perkebunan. Kemitraan yang dianut dalam pengembangan usaha perkebunan dengan memanfaatkan fasilitas kredit adalah pola kemitraan inti dengan plasma (petani). Dalam hubungan kemitraan ini petani diwakili oleh suatu badan usaha yang dibentuk langsung oleh petani yaitu koperasi. Koordinasi pembinaan proyek perkebunan model ABK pola kemitraan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Dengan demikian kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan koperasi berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.

Program ABK Pola Kemitraan memberikan peluang kepada petani peserta untuk memiliki saham pada PKS. Tatacara pemilikan saham ini dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara petani dalam hal ini diwakili oleh koperasi dengan perusahaan inti dan pemerintah melalui instansi yang terkait. Pada program ini disarankan pemilikan saham pada PKS sebaiknya melibatkan tiga komponen, yaitu: petani melalui koperasi; perusahaan inti; dan pemerintah daerah. Sedangkan komposisi dari pemilikan saham dapat diatur berdasarkan kesepakatan dari ketiga komponen tersebut. Rancangan pemilikan modal PKS melalui Program ABK Pola Kemitraan juga sama dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2.

Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan model ABK Pola Kemitraan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Petani peserta ABK Pola Kemitraan adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota koperasi.
- Persiapan dan penetapan calon petani peserta dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui kepala desa sebagai dasar pengesahan oleh bupati.
- Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan kebun sebagai tenaga kerja.
- Petani peserta mendapat hak berupa kebun kelapa sawit dengan luas sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan antara petani dengan koperasi dan perusahaan inti.
- Petani peserta menerima hasil penjualan TBS setelah dipotong cicilan kredit dan kewajiban terhadap koperasi.
- Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun kelapa sawit setelah lunas kredit.

- ❑ Petani berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan kebun kepada pengurus koperasi melalui rapat anggota.
- ❑ Para petani peserta harus patuh dan taat terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kebun ABK Pola Kemitraan.
- ❑ Petani berhak memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS yang dibangun oleh perusahaan inti.

Pada program ABK Pola Kemitraan akan terlibat beberapa badan yang mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi di pedesaan, antara lain:

1. Koperasi Petani

Koperasi petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit rakyat adalah koperasi primer yang telah berbadan hukum sebagaimana di atur oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pelaksanaan kemitraan, terlebih dahulu koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota secara tertulis dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit. Untuk memperoleh dana KKPA, koperasi harus mengajukan permohonan usulan proyek kepada bank pelaksana melalui dan atau bekerjasama dengan perusahaan inti sebagai mitra.

Guna menunjang pendapatan petani peserta, seharusnya koperasi juga membina anggota untuk mengembangkan usahatani sampingan, seperti; tanaman palawija, hortikultura, dan lain sebagainya. Tanaman ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi anggota selain dari hasil kebun kelapa sawit. Dari sisi lain, apabila harga TBS turun petani masih punya harapan sumber pendapatan dari kegiatan usahatani sampingan. Untuk memberikan motivasi kepada petani, maka koperasi harus menjalin kerjasama pemasaran hasil pertanian tersebut dengan pihak ketiga. Pada Gambar 3 disajikan bentuk mitra usaha kegiatan perkebunan rakyat dan tanaman sampingan di daerah pedesaan.

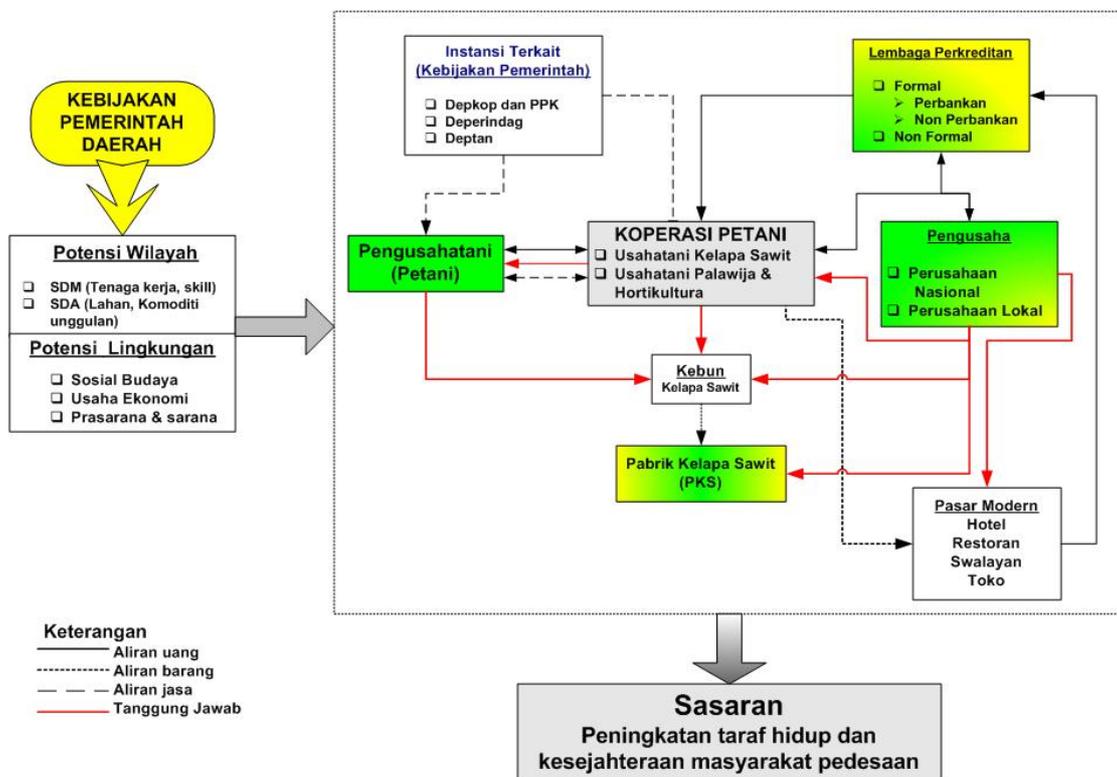
Menurut Wijaya (2002), koperasi merupakan lembaga bisnis yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Koperasi saat ini tidak mencerminkan sebetulnya usaha modern yang dikelola secara profesional, malah mencerminkan citra lembaga yang hanya cocok untuk orang miskin yang tidak memerlukan manajemen. Padahal koperasi merupakan entitas bisnis, manajemen koperasi diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jika koperasi ingin maju, mau tak mau harus bermitra usaha dengan badan usaha lain yang mempunyai kepentingan saling menguntungkan. Kemitraan usaha ini perlu dilakukan untuk mendukung upaya membangun koperasi.

Pengusaha (Perusahaan Inti)

Perusahaan inti sebagai mitra kerja koperasi adalah perusahaan perkebunan milik swasta atau milik negara yang berbentuk badan hukum Indonesia dan menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan mitra. Pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan ABK Pola Kemitraan perusahaan inti harus melakukan kewajibannya, antara lain:

- a. Perusahaan inti yang telah ditunjuk sebagai mitra kerja koperasi harus menunjuk konsultan independen untuk melaksanakan studi kelayakan.

- b. Perusahaan inti yang bermitra dengan koperasi harus membuat perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati setempat. Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi kabupaten sebagai saksi dan sebagai pelaksana pengembangan perkebunan ABK Pola Kemitraan harus memiliki izin usaha budidaya dan izin usaha industri.
- c. Perusahaan inti membangun kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan cq. Dinas Perkebunan Propinsi.
- d. Menampung hasil kebun kelapa sawit anggota dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi petani.
- e. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta melalui pemotongan hasil penjualan TBS maksimal 30 %.



Gambar 3 Model ABK Pola Kemitraan di Pedesaan

Kesimpulan

- 1 Rancangan model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) di pedesaan bertujuan untuk menjamin kepastian pengolahan tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani peserta. Dengan sistem paket agroestate akan menghindarkan penumpukan TBS di kebun petani. Karena penumpukan TBS yang sudah di panen akan mengurangi kualitas minyak sawit. Paket agroestate akan menjamin kepastian harga TBS pada tingkat petani. PKS

akan membeli TBS sesuai dengan harga pasar dan kualitas TBS. Kalau ini tidak terjadi maka petani akan menjual TBS kepada PKS lain (terutama PKS yang tidak didukung oleh kebun) dengan harga yang lebih bersaing. Paket agroestate akan memberikan keuntungan ganda kepada petani, antara lain: kepastian penampungan dan harga TBS; pembagian keuntungan dari pemilikan saham petani pada PKS; pembagian sisa hasil usaha dari koperasi petani.

- 2 Petani adalah pengusaha tani dengan keterbatasan modal. Karena itu model pengelolaan kebun harus dirancang sesuai dengan kebutuhan petani dan mitra, baik kebutuhan bahan baku pabrik kelapa sawit maupun kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian oleh petani. Keterkaitan antara petani dengan mitra ini melalui ABK harus dipadukan oleh koperasi petani dan didukung oleh lembaga keuangan. Apabila ini terabaikan, maka pihak petani tidak dapat merawat kebunnya dengan baik, akibatnya produktivitas kebun menurun. Dampaknya bukan saja penurunan pendapatan petani, tetapi kekurangan bahan baku oleh PKS juga dialami.
- 3 Pembangunan agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) di pedesaan harus direncanakan sedemikian rupa dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan. Pembangunan agroestate yang dirancang harus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.
- 4 Koperasi berbasis agribisnis harus dapat menunjang berkembangnya subsistem agribisnis (perdagangan sarana produksi pertanian, kegiatan usaha tani, pengolahan hasil pertanian, jasa layanan pendukung), penyedia informasi pasar bagi anggota, dapat menerapkan teknologi pertanian, dan pelaku utama kegiatan agroindustri.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini disimpulkan dari hasil Penelitian Fundamental yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007. Penulis mengucapkan terima kasih pada Dirjen Dikti melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan dana untuk Penelitian Fundamental ini. Semoga hasil kerja ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Armas. R. (2005). Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit di Riau. *Jurnal Ekonomi X*(01): halaman 84-94.
- Basri, Y.Z. (2003). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia XXXII*(03):halaman 49-55.
- Arifin. B. (2001). *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

- Elpawati., (2000). *Studi Keberhasilan Petani Kelapa Sawit Peserta PIR BUN di PIR VII Pino Kabupaten Bengkulu Selatan*, Tesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Jeraemi. (2003). *Hubungan Antara Keragaman Sistem Agribisnis dengan Subsistemnya dan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Kartasamita. G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*, CIDES, Jakarta.
- Syahza. A. (2004). *Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*, Disertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syahza, A. (2003a). Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. *Perspektif VIII(01)*: halaman 101-112.
- (2003b). Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. *Jurnal Ekonomi VIII(01)*: halaman 33-42.
- Suhartiningsih. W., (2003). Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia XXXII(02)*, halaman 53-55.
- Wijaya, NHS. (2002). Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia XXXI (07)*: halaman 28-34.
- Zahri. I. (2003). *Pengaruh Alokasi Tenaga Kerja Keluarga Terhadap Pendapatan Petani Plasma PIR Kelapa Sawit Pasca Konversi di Sumatera Selatan*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.